

***Flypaper Effect* Dan Pengaruhnya Terhadap Belanja Daerah Khususnya Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU)**

Flypaper Effect and Its Influence on Regional Expenditures, Especially on Regional Original Income (PAD) and General Allocation Funds (DAU)

Arum Indrasari¹, Recka Kholvieyana²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

arum.indrasari@umy.ac.id

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Flypaper effect* pada belanja daerah terutama pada dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Riau. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 36 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau tahun observasi 2017-2019. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan kepustakaan dengan analisis *statistic descriptive*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah, pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah, pengaruh alokasi dana umum lebih signifikan dibandingkan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah pada periode berjalan tahun sebelumnya tidak berpengaruh terhadap belanja daerah tahun berjalan. Penelitian ini membuktikan bahwa Provinsi Riau belum bisa memaksimalkan kemandirian daerahnya dan masih bergantung dengan dana transfer dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi Pemerintah Daerah khususnya Provinsi Riau untuk pengambilan keputusan dan optimalisasi realisasi anggaran dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan.

Kata Kunci: Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), *Flypaper Effect*, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Abstract - This study aims to examine the effect of the *Flypaper effect* on regional expenditures, especially on general allocation fund (DAU) and regional original income (PAD) in Riau Province. This study was conducted using 36 districts/cities in Riau Province for the 2017-2019 observation year. Data were obtained from documentation and literature with descriptive statistical analysis. The results showed that general allocation fund had effect on regional expenditures, regional original income had no effect on regional expenditures, the effect of general fund allocations was more significant than regional original income and general allocation fund then regional original revenues in the current period of the previous year had no effect on regional expenditures in the previous year. This study proves that Riau Province has not been able to maximize its regional independence and is still dependent on transfer funds from the Central Government. Therefore, this study is expected to be used as material for consideration and evaluation of the Regional Government, especially Riau Province for decision making and optimizing budget realization effort to improve financial performance.

Keywords: Regional Expenditure, General Allocation Fund (DAU), *Flypaper Effect*, Regional Original Income (PAD),

PENDAHULUAN

Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi terkaya di Indonesia karena sumber dayanya didominasi oleh sumber alam, terutama minyak bumi, gas alam, karet, kelapa sawit dan perkebunan serjat. Provinsi Riau memiliki potensi yang besar pada alam dan jika kedua hal ini dapat dikelola dengan maksimal, maka pembangunan daerah dapat optimal. Oleh sebab itu, pemerintah membuat kebijakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan terhadap daerah untuk mengelola potensi yang ada di daerah tersebut, hal ini di paparkan oleh Syamsuar selaku Gubernur Riau. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah mengenai hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah dalam mengurus dan mengatur kegiatan pemerintahan daerah serta kepentingan masyarakat

daerahnya masing-masing dengan peraturan daerah yang berlaku yang dikenal dengan istilah otonomi daerah.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur seluruh kepentingan yang terjadi di masyarakat setempat menurut aspirasi demi meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam segi pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerah tersebut (Umum, 2017). Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah yaitu membebaskan pemerintah pusat dari berbagai beban dan menangani urusan suatu daerah yang bisa diserahkan kepada pemerintah daerah seperti transfer tidak bersyarat yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Transfer tidak bersyarat meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil yang berasal dari pajak dan hasil sumber daya alam serta Dana Alokasi Umum (DAU). Disamping itu, pemerintah pusat memberikan kewenangan atas sumber pendanaan lain seperti Pendapatan Asli Daerah, pembiayaan dan lain-lain pendapatan kepada pemerintah daerah (Ratulangi, 2018).

Realita yang terjadi pada setiap daerah adalah kabupaten yang mempunyai pendapatan yang akan lebih maju perkembangannya dibandingkan dengan kabupaten yang memiliki Pendapatan Asli Daerah yang relatif lebih rendah maka kabupaten tersebut akan cenderung mengharapkan transfer dana tidak bersyarat yang lebih besar dari pemerintah pusat. Hal ini diakibatkan karna tidak meratanya Pemerintah Daerah pada setiap kota/kabupaten dalam mengembangkan pendapatan daerah mereka (Kusumadewi & Rahman, 2007). Kondisi pemerintah daerah yang selalu bertumpu pada transfer tidak bersyarat dari pemerintah pusat ini lah yang dikenal dengan istilah *Flypaper effect*. *Flypaper effect* adalah suatu kondisi dimana pemerintah daerah lebih banyak menggunakan transfer *unconditional grants* atau transfer tidak bersyarat untuk belanja daerahnya dibandingkan dengan pendapatan asli daerahnya, sehingga terjadinya pemborosan dalam pengeluaran belanja daerah (Friyani, 2017). Walaupun dana transfer tidak bersyarat digunakan untuk memenuhi kebutuhan publik, tetapi mengakibatkan kurang termotivasinya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Di samping itu, tekanan fiskal basis pajak lokal menurun yang akan menyebabkan penurunan penerimaan pajak berkurang sedangkan kebutuhan publik semakin meningkat (Kuncoro, 2004).

Sumber Pendapatan Daerah bisa lebih ditingkatkan dari segi mutu pelayanan publik yang sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi pemasukan untuk Pemerintah Daerah (PEMDA). Mengoptimalkan proporsi belanja modal yang lebih tinggi untuk wisata serta pembangunan sektor-sektor yang sekiranya bisa dikembangkan dengan baik di daerah merupakan salah satu cara pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan yang dimiliki untuk kemandirian daerah (Kuncoro, 2004). *Flypaper Effect* menunjukkan bahwa di suatu daerah tersebut dapat dikatakan sudah mandiri atau tidak, sehingga *flypaper effect* juga bisa dilihat dari kinerja keuangan daerah tersebut (Kuncoro, 2007). Pada penelitian sebelumnya *Flypaper Effect* dilihat dari pengaruh dana perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah yang oleh karena itu peneliti akan menambahkan cara untuk menganalisis *Flypaper Effect* dengan melihat kinerja keuangan daerah tersebut bukan dengan melihat pengaruhnya.

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau (dalam miliar rupiah)

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2019		
	Pagu	Real	%	Pagu	Real	%
PAD	7.011,03	6.110,65	87,16	6.710,35	6.171,20	91,97
Pajak Daerah	4.786,56	4.286,58	89,55	4.809,59	4.398,41	91,45
Retribusi Daerah	352,59	169,73	48,14	301,89	178,49	59,12
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	420,99	326,21	77,49	349,80	313,18	89,53

Lain-Lain PAD yang Sah	1.450,88	1.328,13	91,54	1.236,72	1.299,16	105,05
-------------------------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------------	-----------------	---------------

Sumber: LKPD se-Provinsi Riau

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau dikarenakan sumber kekayaan alam yang berlimpah sehingga mempunyai potensi yang sangat besar pada alam serta banyak perusahaan-perusahaan tambang yang dimana pekerja mayoritasnya banyak yang berasal dari luar Riau hingga pekerja asing (luar negeri). Banyaknya industri maupun perusahaan-perusahaan yang ada di Riau, Pemerintah Daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah yang tinggi dari konteks pajak daerah.

Tabel 1 menunjukkan bahwa Komponen PAD yang ada di Riau meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, Pajak Daerah tetap menjadi kontributor utama dari PAD Provinsi Riau. Realisasi Pajak Daerah tahun 2019 sebesar Rp4,39 triliun atau berkontribusi 71,27% dari total PAD. Hal ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan Pajak Daerah yang diterima pada tahun 2018 sebesar Rp4,29 triliun. Analisis perbandingan PAD terhadap belanja daerah dapat digunakan untuk menganalisis kemampuan pemda membiayai belanjanya secara mandiri dan untuk menganalisis tingkat ketergantungan daerah terhadap transfer dari pusat.

Tabel 2. Perbandingan PAD terhadap Belanja Daerah (dalam miliar rupiah)

Uraian	2018	2019
PAD	6.110,65	6.171,20
Belanja Daerah	33.046,31	35.422,04
Rasio PAD terhadap Belanja Daerah	18,49%	17,42%

Sumber: LKPD se-Provinsi Riau

Tabel di atas terlihat bahwa perbandingan PAD terhadap Belanja Daerah setiap tahunnya masih relatif kecil yaitu sekitar 20 persen sehingga dapat diartikan bahwa kemampuan pemda di Riau untuk membiayai belanja bersumber dari PAD sangat rendah dan dapat berarti pula apabila hanya mengandalkan penerimaan yang bersumber dari PAD maka pemerintah daerah hanya mampu membiayai sebesar kurang dari 20 persen dari belanjanya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa untuk mengurangi ketergantungan dalam mendapatkan dana dari Pemerintah Pusat serta untuk memenuhi Belanja Daerah dapat dilakukan yaitu dengan mendapatkan dana pembangunan melalui pendapatan asli daerah (PAD) (Lestari *et al.*, 2016). Tetapi secara praktiknya Pemerintah Daerah masih menggunakan transfer dari pusat sebagai pendapatan utama dalam membiayai aktivitas-aktivitas sehari-hari yang diperhitungkan sebagai pendapatan belanja daerah (APBD). Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat isu *Flypaper effect* untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan terutama dalam kaitannya pendapatan daerah baik segi pendapatan asli daerah (PAD) maupun dana alokasi umum (DAU). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah khususnya Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau. Populasi yang digunakan adalah seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau tahun 2017-2019.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Pelayanan (*Stewardship Theory*)

Teori *Stewardship* atau teori pelayanan menjelaskan kondisi dimana manajer lebih berfokus pada visi misi organisasi untuk kepentingan bersama dan tidak berfokus terhadap kepentingan individu (Mutaqqin, 2014). Teori ini menjelaskan bahwa dalam menjalankan fungsi dan tugasnya seorang manajer untuk mencapai tujuan organisasi adalah dengan mengabdikan dirinya untuk melayani kebutuhan di masyarakat. Implikasi teori *stewardship* adalah pemerintah daerah mengabdikan dirinya untuk melayani masyarakat salah satunya dengan berusaha menunjukkan tanggung jawab atas kinerjanya yang baik dengan meningkatkan sumber daya daerah yang banyak, bisa mempertanggungjawabkan keuangan yang telah diamanahkan,

kekayaan yang besar, bisa dipercaya dalam mendengarkan aspirasi yang diberikan masyarakat. Sehingga, pemerintah daerah dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan melayani masyarakat dengan baik sesuai dengan visi misi pemerintah daerah tersebut secara optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah pendapatan khusus diberikan kepada setiap daerah yang dialokasikan oleh pemerintah pusat agar kondisi keuangan setiap daerah merata dan dapat membiayai kebutuhan daerahnya sehingga tidak ada ketimpangan yang terjadi di daerah tersebut dengan daerah lainnya. Tingkat kemandirian di daerah bisa dilihat dengan semakin tinggi tingkat DAU yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah (Hairiyah *et al.*, 2017), sehingga jika daerah tersebut menerima DAU dengan penerimaan yang tinggi itu membuktikan bahwa kemandirian daerah tersebut masih rendah ataupun belum bisa dikatakan sebagai daerah otonom berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, hal inilah yang dapat dikatakan sebagai *flypaper effect*.

Perilaku tersebut sesuai dengan penjelasan terkait teori pelayanan menurut Davis dan Donaldson dalam Mutaqqin (2014) teori ini menunjukkan situasi pemerintah daerah mengabdikan dirinya untuk melayani masyarakat salah satunya dengan berusaha menunjukkan tanggung jawab atas kinerjanya yang baik dengan meningkatkan sumber daya daerah yang bisa mempertanggungjawabkan keuangan yang dipercayakan kepadanya, kekayaan yang besar, bisa dipercaya dalam mendengarkan aspirasi-aspirasi yang diberikan masyarakat sehingga pemerintah daerah dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan melayani dengan baik masyarakat sesuai dengan visi misi pemerintah daerah tersebut secara optimal dalam meningkatkan kesejahteraan di masyarakat.

Penelitian Lestari *et al.*, (2016) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Artinya makin besar Dana Alokasi Umum maka akan semakin tinggi belanja daerah dan sebaliknya. Dana Alokasi Umum terhadap kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai pengaruh signifikan dan negatif. Artinya makin besar Dana Alokasi Umum maka akan semakin rendah tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

H1: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah

Kemandirian dalam suatu daerah dapat dilihat melalui tingginya tingkat PAD yang diperoleh Pemerintah Daerah, apabila tingkat PAD yang diterima semakin tinggi maka semakin besar kemungkinan daerah tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri dan tidak bergantung dengan dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Daerah tersebut bisa dikatakan daerah otonom (Hairiyah *et al.*, 2017). PAD adalah salah satu komponen biaya belanja daerah, sehingga apabila tingkat PAD tinggi maka belanja daerah juga tinggi dikarenakan kebutuhan belanja daerah yang semakin meningkat.

Penjelasan terkait perilaku diatas sejalan dengan penelitian terdahulu tentang teori pelayanan menurut Davis dan Donaldson dalam Mutaqqin (2014) teori ini menunjukkan situasi pemerintah daerah mengabdikan dirinya untuk melayani masyarakat salah satunya dengan berusaha menunjukkan tanggung jawab atas kinerjanya yang baik dengan meningkatkan sumber daya daerah yang bisa mempertanggungjawabkan keuangan yang dipercayakan kepadanya, kekayaan yang besar, bisa dipercaya dalam mendengarkan aspirasi-aspirasi yang diberikan masyarakat sehingga pemerintah daerah dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan melayani dengan baik masyarakat sesuai dengan visi misi pemerintah daerah tersebut secara optimal dalam meningkatkan kesejahteraan di masyarakat.

Penelitian Lambut & Budiarmo (2013) mengungkapkan bahwa PAD terhadap Belanja Daerah berpengaruh signifikan. Sehingga apabila PAD yang diterima tinggi maka Belanja Daerah juga akan semakin tinggi dalam realisasi Tahun Anggaran 2001 – 2010 yang artinya Pendapatan

Asli Daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terhadap Belanja Daerah pengaruh positif dan signifikan.

H2: Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berpengaruh Positif terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh *flypaper effect* pada hubungan DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah

Nilai PAD yang nilainya sangat rendah jika dibandingkan dengan Belanja Daerah menyebabkan Pemerintah Daerah lebih memilih menggunakan DAU dibandingkan PAD. Pada beberapa daerah yang PAD nya rendah dikarenakan kurang berkembangnya potensi daerah untuk meningkatkan PAD. Dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum memang mempunyai pengaruh lebih tinggi terhadap Belanja Daerah (Umum, 2017). Hal ini menunjukkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum bisa menstimulus kota ataupun kabupaten di Indonesia. Maka bisa disimpulkan bahwa telah terjadi *flypaper effect* khususnya pada Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah. Hal Ini menunjukkan bahwasanya kabupaten ataupun kota di Indonesia mayoritas dari setiap daerah lebih memilih Dana Alokasi Umum sebagai sumber utama mereka dalam mendanai belanja daerah dibandingkan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan menginovasi potensi yang ada pada daerah tersebut.

Perilaku tersebut sesuai dengan teori pelayanan menurut Davis dan Donaldson dalam Mutaqqin (2014) teori ini menunjukkan situasi pemerintah daerah mengabdikan dirinya untuk melayani masyarakat salah satunya dengan berusaha menunjukkan tanggung jawab atas kinerjanya yang baik dengan meningkatkan sumber daya daerah yang bisa mempertanggungjawabkan keuangan yang dipercayakan kepadanya, kekayaan yang besar, bisa dipercaya dalam mendengarkan aspirasi-aspirasi yang diberikan masyarakat sehingga pemerintah daerah dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan melayani dengan baik masyarakat sesuai dengan visi misi pemerintah daerah tersebut secara optimal dalam meningkatkan kesejahteraan di masyarakat.

Penelitian Wahyuni & Supheni (2017) mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Periode 2012-2016 mengalami *flypaper effect* pada belanja daerah. Artinya, respon Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk masih menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai dana utama dalam membiayai belanja daerahnya. Hasil yang didapat adalah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dengan nilai koefisien DAU sebesar 1,857. Sedangkan tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dengan nilai koefisien PAD adalah sebesar -0,198. Maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk sehingga hipotesis dapat diterima. Bisa dikatakan *Flypaper Effect* apabila respon Pemerintah Daerah dalam membiayai kebutuhannya terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu pemasukan yang diterima dari transfer Pemerintah Pusat lebih mendominasi dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada penelitian Tuaputimain (2019) menjelaskan jika pengaruh PAD terhadap belanja daerah jika dibandingkan dengan pengaruh DAU terhadap belanja daerah lebih kuat. Artinya, pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan belanjanya masih menjadikan DAU sebagai dana utama daripada PAD nya sendiri. Dapat disimpulkan telah terjadi *flypaper effect* dalam respon daerah terhadap DAU dan PAD

H3: Pengaruh dana alokasi umum (PAD_t) terhadap belanja daerah (BD_t) lebih besar dari pada pengaruh pendapatan asli daerah (PAD_t) terhadap belanja daerah (BD_t)

Pengaruh *flypaper effect* pada hubungan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap prediksi Belanja Daerah

Perilaku Pemerintah Daerah dalam menerima dana transfer yang diberikan oleh Pemerintah Pusat membuktikan bahwa respon daerah berbeda untuk dana transfer daripada pendapatan daerahnya sendiri. Ketika respon Pemerintah Daerah lebih tinggi untuk transfer dibandingkan pendapatan daerah maka disebut *flypaper effect* (Kusumadewi & Rahman, 2007). Prediksi Belanja Daerah khususnya pada DAU tetap lebih tinggi dibanding daya prediksi PAD maka

terjadi *flypaper effect*. Semakin tinggi DAU_{t-1} maka semakin tinggi BD_t, dan apabila semakin tinggi perolehan PAD_{t-1} maka akan semakin tinggi pula BD_t (Prediksi Belanja Daerah dimasa mendatang). Pada perspektif teori pelayanan menurut Davis dan Donaldson dalam Mutaqqin (2014) teori ini menunjukkan situasi pemerintah daerah mengabdikan dirinya untuk melayani masyarakat salah satunya dengan berusaha menunjukkan tanggung jawab atas kinerjanya yang baik dengan meningkatkan sumber daya daerah yang bisa mempertanggungjawabkan keuangan yang dipercayakan kepadanya, kekayaan yang besar, bisa dipercaya dalam mendengarkan aspirasi-aspirasi yang diberikan masyarakat sehingga pemerintah daerah dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan melayani dengan baik masyarakat sesuai dengan visi misi pemerintah daerah tersebut secara optimal dalam meningkatkan kesejahteraan di masyarakat. Menurut Iskandar (2012) *Flypaper effect* merupakan suatu kondisi dimana stimulus terhadap pengeluaran daerah yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam jumlah transfer (*unconditional grants*) dari pemerintah pusat lebih besar dari yang disebabkan oleh perubahan dalam pendapatan daerah. Menurut Tuaputimain (2019) mengungkapkan bahwa pengaruh DAU pada tahun sebelumnya terhadap Belanja Daerah tahun berjalan memiliki pengaruh yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengaruh PAD pada tahun sebelumnya terhadap belanja daerah atau dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan belanja daerah tahun berjalan lebih ditentukan oleh DAU daripada PAD yang telah diterima pada periode sebelumnya. Ini juga membuktikan bahwa dalam respon Pemda terhadap DAU dan PAD pada tahun sebelumnya juga terjadi *flypaper effect*.

H4: Pengaruh DAU_{t-1} terhadap BD_t lebih besar daripada pengaruh PAD_{t-1} Terhadap BD_t

METODE PENELITIAN

Objek pada penelitian ini adalah BPKAD Riau pada laporan realisasi anggaran dan APBD tahun 2017-2019. Data dalam penelitian ini berdasarkan laporan keuangan di kota/kabupaten Provinsi Riau yaitu Kota Pekanbaru (ibu kota provinsi) dan Kota Dumai yang mempunyai 10 Kabupaten yaitu, Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Pelalawan, Siak, Bengkalis, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *full sampling*, yaitu semua daerah Kabupaten/Kota di Riau yang melaporkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Riau yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi dan studi kepustakaan.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah. Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Belanja Daerah merupakan anggaran tahunan pemerintahan daerah yang telah dibahas ataupun disepakati oleh pemerintah daerah dan DPRD untuk ditetapkan dengan peraturan daerah. Variabel independen dalam penelitian ini adalah dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD). DAU merupakan salah satu menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD serta komponen belanja pada APBN. Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 27 Ayat 1 dalam APBN telah ditetapkan Jumlah keseluruhan DAU dari Pendapatan Dalam Negeri Neto sekurang-kurangnya sebesar 26%. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dilihat dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal penentuan proporsi dimaksud belum dapat dihitung secara kuantitatif, maka proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbang 10% dan 90%. PAD adalah pemasukan yang didapatkan daerah dari pungutan dengan peraturan perundang-undangan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18. Pendapatan Asli Daerah yaitu pemasukan yang didapatkan melalui pungutan yang dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah. Pemasukan PAD seperti pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah menurut (Warsito, 2001:128).

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 3. Hasil Uji Statistik

Variabel	N	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Std.Deviasi
Belanja Daerah	36	375784825	96929373	180580607.22	63181790.897
Dana Alokasi Umum (DAU)	36	71012920	6800636	22434802.61	15555689.478
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	36	156882551	5140190	60781762.19	26634380.606

Tabel 3 menunjukkan bahwa belanja daerah kabupaten/kota yang mempunyai nilai minimum adalah kepulauan meranti pada tahun 2017 sebanyak Rp. 96.929.373, dan kabupaten/kota yang mempunyai nilai maksimum adalah bengkalis 2019 sebanyak Rp. 375.784.825, Jumlah rata-rata hitung untuk Belanja Daerah adalah sebesar Rp. 18.058.060.722 dan untuk jumlah Deviasi Standar berada diatas rata-rata Rp. 63.181.790.897, hal ini berarti bahwa besarnya Belanja Daerah yang di jadikan sampel di dalam penelitian ini memiliki nilai yang bervariasi.

Tabel 3 menunjukkan bahwa dana alokasi umum pada kabupaten/kota memiliki nilai minimum yaitu Indragiri hulu pada tahun 2019 sebanyak Rp. 6.800.636, dan kabupaten kota yang mempunyai nilai maksimum adalah kampar pada tahun 2017 sebanyak Rp. 71.012.920, Jumlah rata-rata hitung untuk dana alokasi umum adalah sebesar Rp. 2.243.480.261 dan untuk jumlah Deviasi Standar berada diatas rata-rata Rp. 15.555.689.478, hal ini berarti bahwa besarnya dana alokasi umum yang di jadikan sampel di dalam penelitian ini memiliki nilai yang bervariasi.

Tabel 3 menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah kabupaten/kota yang mempunyai nilai minimum adalah kepulauan meranti pada tahun 2018 sebanyak Rp. 5.140.190, dan kabupaten/kota yang memiliki nilai maksimum adalah pelalawan pada tahun 2019 sebanyak Rp. 156.882.551, Jumlah rata-rata hitung untuk pendapatan asli daerah adalah sebesar Rp. 6.078.176.219 dan untuk jumlah Deviasi Standar berada diatas rata-rata Rp. 26.634.380.606, hal ini berarti bahwa besarnya pendapatan asli daerah yang di jadikan sampel di dalam penelitian ini memiliki nilai yang bervariasi.

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	B	t-stat	Signifikansi
Dana Alokasi Umum	1,715	2,673	0,012**
Pendapatan Asli Daerah	-0,195	-0,521	0,606
<i>Flypaper effect</i> _t	-0,009	-0,103	0,918
<i>Flypaper effect</i> _{t-1}	-0,055	-0,244	0,809
Cons	7,548	5,515	0,000
N	36		
Adj. R Square (R²)	0,131		

Catatan: ** signifikansi 5%

Tabel 4 menunjukkan hasil hipotesis dari masing-masing variabel. Dana alokasi umum memiliki nilai signifikansi sebesar $0,012 < 0,05$ dan memiliki nilai arah yang positif sehingga dapat dikatakan bahwa **H1 terdukung**. Sedangkan untuk variabel pendapatan asli daerah memiliki nilai signifikansi sebesar $0,606 > 0,05$. Ini menunjukkan bahwa untuk **H2 tidak terdukung**. Hasil dari pengujian diatas bisa disimpulkan bahwa pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau pada tahun 2017-2019 terdapat *flypaper effect* karena DAU berpengaruh dibandingkan dengan PAD yang tidak berpengaruh. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah yang artinya **H3 terdukung**. Pada tabel 4 diatas DAU (dana alokasi umum) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,918 > 0,05$ sedangkan pada PAD (pendapatan asli daerah) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,809 > 0,05$ sehingga dapat dikatakan **H4 tidak terdukung**. Hal ini berarti DAU (dana alokasi umum) dan PAD (pendapatan asli daerah) pada periode tahun sebelumnya tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah pada tahun terakhir penelitian.

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Daerah

Dalam penelitian ini hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Pengaruh positif disini menunjukkan bahwa semakin tinggi DAU (dana alokasi umum) maka Belanja Daerah akan semakin meningkat. Dana alokasi umum (DAU) merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk pemerataan keuangan antar daerah dalam mencukupi kebutuhan daerah itu sendiri (Hairiyah *et al.*, 2017).

Perilaku tersebut sesuai dengan penjelasan terkait teori pelayanan menurut Davis dan Donaldson dalam Mutaqqin (2014) teori ini menunjukkan situasi pemerintah daerah mengabdikan dirinya untuk melayani masyarakat salah satunya dengan berusaha menunjukkan tanggung jawab atas kinerjanya yang baik dengan meningkatkan sumber daya daerah yang bisa mempertanggungjawabkan keuangan yang dipercayakan kepadanya, kekayaan yang besar, bisa dipercaya dalam mendengarkan aspirasi-aspirasi yang diberikan masyarakat sehingga pemerintah daerah dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan melayani dengan baik masyarakat sesuai dengan visi misi pemerintah daerah tersebut secara optimal dalam meningkatkan kesejahteraan di masyarakat. Sehingga dengan adanya DAU (dana alokasi umum) untuk mencukupi kebutuhan di daerah maka ini selaras dengan tujuan dari pemerintah pusat agar pemerataan keuangan daerah terlaksana dengan baik.

Menurut Lestari *et al.*, (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa DAU berpengaruh terhadap belanja daerah. Artinya semakin tinggi nilai dari DAU maka akan semakin tinggi pula Belanja Daerah dan sebaliknya. Dana Alokasi Umum terhadap kemandirian keuangan pada pemerintah daerah menunjukkan pengaruh yang signifikan dan negatif. Artinya semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka tingkat Kemandirian Keuangan Daerah tersebut rendah.

Hasil pada penelitian ini sejalan dengan penelitian kesit pada tahun 2004 yang menjelaskan bahwa DAU (dana alokasi umum) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Dana transfer yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah menyebabkan pemerintah daerah lebih leluasa menggunakan dana tersebut untuk keperluan belanja agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat.

Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari *et al.*, (2016), Lambut & Budiarmo (2013), Mangkurat & Perimbangan (2015) dan Kesit (2004) yang menghasilkan kesimpulan adanya pengaruh positif dan signifikan antara DAU (dana alokasi umum) terhadap Belanja Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah

Dalam penelitian ini hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa PAD (pendapatan asli daerah) berpengaruh negatif terhadap Belanja Daerah. Pengaruh negatif disini menunjukkan bahwa kontribusi PAD (pendapatan asli daerah) belum sepenuhnya mampu meminimalkan ketergantungan daerah Kabupaten/kota Provinsi Riau terhadap bantuan dana yang diberikan pemerintah pusat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan PAD di Provinsi Riau masih relatif rendah dikarenakan pemerintah daerah kurang maksimal dalam memanfaatkan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan yang ada di Provinsi Riau sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah Provinsi Riau masih belum mandiri.

Stewardship Theory merupakan suatu teori yang menjelaskan situasi dimana para manajer lebih termotivasi pada visi misi organisasi untuk kepentingan bersama dan tidak termotivasi terhadap kepentingan individu menurut Schorman dan Donaldson dalam Mutaqqin, (2014). Teori ini menjelaskan bahwa dalam menjalankan fungsi dan tugasnya seorang manajer untuk mencapai tujuan organisasi adalah dengan mengabdikan dirinya untuk melayani kebutuhan di masyarakat. Pada penelitian ini implikasi teori *stewardship* adalah pemerintah daerah mengabdikan dirinya untuk melayani masyarakat salah satunya dengan berusaha menunjukkan tanggung jawab atas kinerjanya yang baik dengan meningkatkan sumber daya daerah yang banyak, yang bisa membuat pertanggung jawaban keuangan yang telah dipercayakan

kepadanya, kekayaan yang besar, bisa dipercaya dalam mendengarkan aspirasi-aspirasi yang diberikan masyarakat sehingga pemerintah daerah dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan melayani dengan baik masyarakat sesuai dengan visi misi pemerintah daerah tersebut secara optimal dalam meningkatkan kesejahteraan di masyarakat.

Teori tersebut bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan. Hal ini disebabkan karena kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang ada di daerah tersebut sehingga pemerintah daerah masih bergantung dengan dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat. Keadaan ini menggambarkan bahwa adanya ketimpangan yang cukup signifikan dari segi kemampuan daerah (Mangkurat & Perimbangan, 2015).

Pemerintah daerah cenderung menggunakan DAU (dana alokasi umum) dibandingkan dengan menggunakan PAD (pendapatan asli daerah) dikarenakan masih lemahnya pemasukan dari PAD (pendapatan asli daerah) sehingga jika pemerintah daerah menjadikan PAD sebagai dana utama dalam belanja daerah maka kebutuhan daerah tidak terpenuhi secara maksimal. Pemerintah daerah harus memenuhi kebutuhan daerah agar tercukupi dengan baik walaupun dengan menjadikan DAU sebagai dana utama dalam belanja daerah sehingga pemerintah daerah tidak fokus memikirkan bagaimana mengembangkan atau meningkatkan pemasukan dengan mengandalkan PAD sebagai dana utama untuk belanja daerah karena pemerintah daerah lebih terfokus dengan bagaimana belanja daerah tercukupi dan dapat melayani dengan baik kebutuhan di masyarakat.

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Kusumadewi & Rahman (2007) menunjukkan bahwa PAD (pendapatan asli daerah) tidak mempunyai pengaruh terhadap Belanja Daerah dan Aprilla & Saputra (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pertumbuhan PAD (pendapatan asli daerah) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan Belanja Daerah. Penelitian ini mendukung penelitian dari Kusumadewi & Rahman (2007), Aprilla & Saputra (2011), Mangkurat & Perimbangan (2015), Amalia *et al.*, (2015) yang menunjukkan bahwa PAD (pendapatan asli daerah) berpengaruh negatif terhadap belanja daerah. Namun, hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan Tuaputimain (2019), Putri (2014), Lambut & Budiarmo (2013), Umum (2017).

Pengaruh DAUt terhadap BDT lebih besar dari pada pengaruh PADt terhadap BDT

Hasil pengujian pada hipotesis ketiga menunjukkan bahwa DAU (dana alokasi umum) berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah dibandingkan PAD (pendapatan asli daerah) terhadap belanja daerah. Hasil pengujian hipotesis pertama diketahui bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah sedangkan PAD tidak berpengaruh negatif terhadap belanja daerah, sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi *flypaper effect* pada pengaruh pertumbuhan DAU yang lebih besar terhadap belanja daerah daripada pengaruh pertumbuhan PAD terhadap belanja daerah.

Penelitian ini sesuai dengan Perilaku tersebut sesuai dengan penjelasan terkait teori pelayanan menurut Davis dan Donaldson dalam Mutaqqin (2014) teori ini menunjukkan situasi pemerintah daerah mengabdikan dirinya untuk melayani masyarakat salah satunya dengan berusaha menunjukkan tanggung jawab atas kinerjanya yang baik dengan meningkatkan sumber daya daerah yang bisa mempertanggungjawabkan keuangan yang dipercayakan kepadanya, kekayaan yang besar, bisa dipercaya dalam mendengarkan aspirasi-aspirasi yang diberikan masyarakat sehingga pemerintah daerah dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan melayani dengan baik masyarakat sesuai dengan visi misi pemerintah daerah tersebut secara optimal dalam meningkatkan kesejahteraan di masyarakat.

Penelitian Wahyuni & Supheni (2017) mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Periode 2012-2016 telah terjadi *Flypaper Effect* terhadap belanja daerah. Artinya respon Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk masih menggunakan dana alokasi umum sebagai dana utama dalam membiayai belanja daerahnya daripada PAD. Kesimpulannya adalah

Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk telah terjadi *Flypaper Effect* pada belanja daerah sehingga hipotesis dapat diterima. Bisa dikatakan *Flypaper Effect* apabila respon pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhannya terhadap dana alokasi umum (DAU) yaitu pemasukan yang diterima dari transfer pemerintah pusat lebih mendominasi dibandingkan dengan pendapatan asli daerah (PAD).

Pada penelitian Tuaputimain (2019) menjelaskan jika pengaruh PAD terhadap belanja daerah jika dibandingkan dengan pengaruh DAU terhadap belanja daerah lebih kuat. Dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan belanjanya lebih didominasi oleh jumlah DAU yang diterima pada tahun berjalan daripada PAD nya sendiri. Bisa disimpulkan telah terjadi *flypaper effect* dalam respon daerah terhadap DAU dan PAD. Penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Wahyuni & Supheni (2017) dan Tuaputimain (2019) yang menghasilkan kesimpulan bahwa pengaruh DAU terhadap belanja daerah lebih besar dan signifikan dari pada pengaruh PAD terhadap belanja daerah.

Pengaruh DAUt-1 terhadap BDt lebih besar daripada pengaruh PADt-1 Terhadap BDt

Hasil pengujian pada hipotesis keempat menunjukkan bahwa kedua variabel independen yaitu DAU dan PAD pada tahun sebelumnya tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Hal ini tidak dapat membuktikan bahwa telah terjadinya *flypaper effect* karena dapat dikatakan terjadinya *flypaper effect* apabila DAU berpengaruh signifikan dibandingkan PAD terhadap belanja daerah. Penelitian ini sesuai dengan teori pelayanan menurut Davis dan Donaldson dalam Mutaqqin (2014) teori ini menunjukkan situasi pemerintah daerah mengabdikan dirinya untuk melayani masyarakat salah satunya dengan berusaha menunjukkan tanggung jawab atas kinerjanya yang baik dengan meningkatkan sumber daya daerah yang bisa mempertanggungjawabkan keuangan yang dipercayakan kepadanya, kekayaan yang besar, bisa dipercaya dalam mendengarkan aspirasi-aspirasi yang diberikan masyarakat sehingga pemerintah daerah dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan melayani dengan baik masyarakat sesuai dengan visi misi pemerintah daerah tersebut secara optimal dalam meningkatkan kesejahteraan di masyarakat. Teori tersebut bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah menetapkan kebijakan belanja daerah pada tahun berjalan tidak ditentukan oleh DAU dan PAD yang sudah diterima pada periode tahun sebelumnya sehingga dalam respon pemerintah daerah terhadap DAUt-1 dan PADt-1 membuktikan tidak terjadinya *flypaper effect*. Penelitian ini sejalan dengan Aprilla & Saputra (2011) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan DAU pada tahun sebelumnya tidak berpengaruh terhadap belanja daerah tahun berjalan sedangkan PAD tahun sebelumnya berpengaruh terhadap belanja daerah dengan kesimpulan dalam penelitiannya bahwa tidak terjadi *flypaper effect*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan yaitu: Pertama, dana alokasi umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja daerah sehingga semakin bertambahnya dana alokasi umum (DAU) akan mempengaruhi besarnya pengeluaran pada belanja daerah. Artinya, Pemerintah Daerah di Provinsi Riau mengalami *flypaper effect* karena pengeluaran Pemerintah Daerah lebih mengandalkan dana transfer dari Pemerintah Pusat untuk mencukupi kebutuhan Daerahnya, Kedua, pendapatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh dimana hal ini menunjukkan bahwa setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Riau cenderung kurang memanfaatkan sumber daya yang ada di daerahnya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sumber pengeluaran utama belanja daerah. Ketiga, dana alokasi umum (DAU) lebih mempengaruhi belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini membuktikan bahwa telah terjadi *flypaper effect* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau periode tahun 2017-2019 dimana tingkat kemandirian Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dapat dikatakan masih rendah karena dipengaruhi oleh tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat untuk mencukupi kebutuhan disetiap daerahnya

dan kurang optimalnya pemerintah daerah di Provinsi Riau dalam mengembangkan potensi yang ada di daerah tersebut. Keempat, Dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) tahun sebelumnya (2016) tidak berpengaruh terhadap belanja daerah (2019). Hasil pengujian ini membuktikan bahwa tidak terjadi *flypaper effect*.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dilalui selama penulisan yaitu keterbatasan pada penelitian ini yaitu adanya kendala pada data normalitas dan harus melakukan transform data agar data penelitian menjadi berdistribusi normal dengan menggunakan logaritma natural. Oleh karena itu untuk penelitian selanjutnya bisa lebih memperhatikan data yang digunakan untuk mengolah data sehingga nantinya data variabel dalam penelitian ini dapat berdistribusi normal dan bisa menggunakan aspek lain seperti dana bagi hasil ataupun perilaku pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan baik dari dana alokasi umum (DAU) maupun pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja daerah di Provinsi Riau. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah Provinsi Riau masih belum mandiri dan bergantung terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Akan tetapi, dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah pada tahun sebelumnya tidak memengaruhi belanja daerah tahun berjalan. Adanya hal tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi maupun pertimbangan untuk pemerintah daerah di Provinsi Riau dalam mengambil keputusan dalam merealisasikan anggaran dan meningkatkan kinerja keuangan serta mengoptimalkan sumber daya yang ada di daerah untuk menjadikan pendapatan asli daerah sebagai pendanaan utama dalam mencukupi dan mengelola kebutuhan daerahnya sendiri.

REFERENSI

- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
- Amalia, W. R., Nor, W., & Nordiansyah, M. (2015). Flypaper Effect pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2), 188–200. <http://jab.fe.uns.ac.id/index.php/jab/article/view/171>
- Aprilla, N., & Saputra, R. A. (2011). Pengaruh Flypaper Effect, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 1–74.
- Citra, C. K. B., & Jatmiko, B. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Flypaper Effect terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten & Kota di DIY 2010-2016). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 1(2), 121–130. <https://doi.org/10.18196/rab.010211>
- Hairiyah, Malisan, L., & Fakhroni, Z. (2017). Pengaruh DAU, DAK dan PAD terhadap Belanja Modal. *Kinerja*, 14(2), 85–91. <https://doi.org/10.29264/jkin.v14i2.2483>
- Iskandar, I. (2012). Flypaper Effect Pada Unconditional Grant. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 13(1), 113. <https://doi.org/10.23917/jep.v13i1.186>
- Kuncoro, H. (2004). Pengaruh Transfer Antar Pemerintah pada Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 34, 47–63.
- Kuncoro, H. (2007). Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 1–29.

- Kusumadewi, D. A., & Rahman, A. (2007). Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 11, 67–80.
- Lambut, A. K., & Budiarmo, N. (2013). Flypaper Effect Pada DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Accountability*, 2(1), 50–60. <https://media.neliti.com/media/publications/84969-ID-analisis-profesionalisme-anggota-dprd-da.pdf>
- Lestari, A., Dali, N., & Abdullah, M. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau) dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) terhadap Belanja Modal Dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 44–55. <https://doi.org/10.33772/jpeb.v1i2.1801>
- Mangkurat, U. L., & Perimbangan, D. (2015). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. 15(1), 1–12.
- Putri, A. I. (2014). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2011-2012. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 747–757.
- Subadriyah, S. (2017). Flypaper Effect: Sebelum dan Sesudah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Akrual. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(3), 559–570. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7073>
- Tuaputimain, Y. (2019a). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah. *Gorontalo Accounting Journal*, 2(2), 65. <https://doi.org/10.32662/gaj.v2i2.615>
- Tuaputimain, Y. (2019b). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah. *Gorontalo Accounting Journal*, 2(2), 65. <https://doi.org/10.32662/gaj.v2i2.615>
- Umum, D. A. (2017). *Flypaper Effect , PAD , DAU , DAK Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten / Kota Di Indonesia . Abstrak Pendahuluan*. 1(2).
- Wahyuni, S. E., & Supheni, I. (2017). Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah (Pad), dan Dana Alokasi Umum (Dau) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Periode 2012-2016. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), 1. <https://doi.org/10.20961/jab.v15i1.171>
- Sulviyani, A., Firman, A., Armawaddin, M., Oleo, U. H., Tenggara, S., Oleo, U. H., Tenggara, S., Oleo, U. H., & Tenggara, S. (2018). *Flypaper effect pada belanja daerah kota kendari*. 8(1), 23–33.
- Widi Angga Kurniawan. (2016). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (Dau) dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung). *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 23(45), 5–24.
- Pradipta, W. T., & Jatmiko, B. (2019). *Pengaruh Flypaper Effect, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris pada Provinsi di Indonesia Tahun 2014-2016)*. 2(2), 171–185.

- Daerah, T. B. (2014). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dau dan Dak terhadap Belanja Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 457–465. <https://doi.org/10.15294/aaj.v3i4.4207>
- Ekawarna, S. U. (2017). *Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah (Studi Komparasi Daerah Induk dan Pemekaran kabupaten / kota di Provinsi Jambi)*. 4(3), 167–184.
- Subadriyah, S. (2017). Flypaper Effect: Sebelum dan Sesudah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Akrual. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(3), 559–570. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7073>
- Pendapatan, D. A. N., Daerah, A., & Prakosa, K. B. (2004). *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY)*. 8(2), 101–118.